

Negara Akui Tari Fomani dan Meta'u'a, Tradisi Leluhur Masyarakat Siompu di Buton Selatan





DIAKUI RESMI KEMENTERIAN KEBUDAYAAN RI
Sertifikat diterbitkan 15 Desember 2025.



NOMOR SERTIFIKAT 425/WB/KP001/002
Menjadi bukti pengakuan negara atas Tari Fomani dan Meta'u'a.



BERASAL DARI SIOMPU & SIOMPU BARAT
Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.



DIWARISKAN TURUN-TEMURUN
Menjadi bagian penting dari kehidupan adat dan sosial masyarakat Siompu.



PERLU DILESTARIKAN
Tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah dan generasi muda.



DIHADIRI SEJUMLAH PEJABAT
Pemkab Buton Selatan, Dinas Kebudayaan Sultra, DPRD, tokoh adat, serta masyarakat Siompu.

Jaga Budaya, Lestarkan Jati Diri

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Republik Indonesia mengakui Tari Fomani dan Meta'u'a sebagai warisan budaya yang telah lama hidup dan diwariskan masyarakat Siompu dan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Pengakuan itu ditandai dengan sertifikat Kementerian Kebudayaan yang diterbitkan pada 15 Desember 2025.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan La Ode Harwanto menyampaikan pengakuan tersebut dalam acara adat Meta'u'a yang digelar masyarakat enam desa yang tergabung dalam persekutuan Binawakili Biwinapada, Nggulanggula, Wak-

inamboro, Batuwau, Lapara, dan Tongali, Kecamatan Siompu, Minggu (20/9/2026). Sertifikat tersebut bernomor 425/WB/KP001/002. "Tari Fomani dan Meta'u'a telah resmi bersertifikat dari Kementerian Kebudayaan," kata Har-

wanto di hadapan masyarakat adat dan para undangan. Menurut dia, pengakuan tersebut memperkuat kedudukan kedua tradisi sebagai kekayaan budaya masyarakat yang perlu dijaga keberlangsungannya. Meta'u'a sendiri menjadi bagian pent-

ing dari kehidupan adat masyarakat Siompu. Pelaksanaan tradisi tersebut merupakan pemertemuan masyarakat dalam ruang budaya yang tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga menjadi sarana menjaga ingatan kolektif, nilai sosial, dan hubungan antargenerasi. Kehadiran Tari Fomani turut memperlihatkan bagaimana ekspresi seni berkembang bersama praktik adat masyarakat setempat.

Dalam sejarah ke-

budayaan Indonesia, pengakuan negara terhadap tradisi lokal merupakan bagian dari upaya pendataan dan perlindungan kekayaan budaya takbenda. Secara lebih luas, perlindungan warisan budaya takbenda mendapat perhatian internasional melalui Konvensi UNESCO 2003 tentang Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, yang menekankan pentingnya menjaga praktik, ekspresi, pengetahuan, serta keterampilan budaya yang diwariskan antargenerasi.

Harwanto menilai

Lanjut ke Hal: 7

Pemkab Buton Tengah dan BPN Percepat Sertifikasi 2.000 Bidang Tanah, Bupati Azhari Akan Serahkan 1.500 Sertifikat



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Sebanyak 1.500 sertifikat tanah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, siap diserahkan dalam waktu dekat. Sertifikat tersebut diperuntuk-

kan bagi warga di 19 desa dan kelurahan yang tersebar pada empat kecamatan.

Bupati Buton Tengah Dr. Azhari mengatakan, penyerahan sertifikat akan dilakukan di desa-desa yang menjadi lokasi penerima. Pemerintah daerah bersama Kantor

Pertanahan Kabupaten Buton Tengah juga masih memproses sekitar 500 sertifikat lainnya untuk masyarakat di tiga kecamatan.

"Insyaallah dalam waktu dekat kita akan mulai membagikan sertifikat-sertifikat itu di desa-desa yang

akan dituju," kata Azhari se usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Buton Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah, Kamis (24/9/2026).

Kerja sama tersebut

Lanjut ke Hal: 7

Meta'u'a Binawakili Hidupkan Jejak 400 Tahun Armada Jawa di Siompu, Dimeriahkan 120 Penari



Laporan: Prasetyo

BUTON SELATAN, BP -Sebanyak 120 penari putri dari Siompu Barat menjadi bagian dari pertunjukan kolosal dalam tra-

disi Meta'u'a yang digelar masyarakat adat Binawakili di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Minggu (20/9/2026). Tradisi tersebut menja-

di medium masyarakat adat untuk merawat ingatan kolektif mengenai jejak kedatangan armada yang

Lanjut ke Hal: 7

Delapan Titik Kebakaran Lahan Ditangani Damkar Baubau pada 22-24 September, Warga Kembali Diingatkan Tidak Bakar Lahan



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau menangani delapan kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah selama 22-24 September 2026. Sebagian besar kebakaran diduga bermula dari aktivitas

pembakaran lahan dan sampah yang tidak diawasi hingga api merembet ke area di sekitarnya.

Kepala Damkar dan Penyelamatan Kota Baubau H. La Ode Ali Hasan, S.E., M.Si., mengatakan

Lanjut ke Hal: 7

Dukcapil Buton Selatan Genjot IKD, Aktivasi Warga Baru 5,94 Persen



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) setelah cakupannya baru mencapai 5,94 persen hingga 15 September 2026.

Disdukcapil setempat menilai rendahnya capaian tersebut berkaitan dengan belum luasnya informasi mengenai layanan administrasi kependudukan berbasis digital kepada masyarakat.

Lanjut ke Hal: 7

Prabowo Sebut Omongannya Dipelintir Seolah Tidak Hormati Pakar, Buktinya Presiden Libatkan 22 Pakar Bahas Gambut dan Ancaman Kebakaran Hutan



Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pidatonya terkadang dipelintir dan dinarasikan bahwa dirinya tidak menghormati pakar.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya masukan ilmuwan dalam pengelolaan lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penegasan itu disampaikan saat pemerintah memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah pertemuan dengan 22 pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu keputusan dalam pertemuan yang membahas pengelolaan ekosistem gambut, penanganan kebakaran ketika terjadi, serta strategi pencegahan berbasis riset. Pemerintah menyatakan BPGMN akan diarahkan untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove sekaligus mencegah karhutla, terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan lembaga baru itu akan berada langsung di bawah Presiden. Menurut dia, pembentukan BPGMN merupakan salah satu keputusan penting yang diambil setelah Prabowo mendengarkan masukan dari para akademisi dan pakar.

“Pak Presiden

sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN,” kata Raja Juli dalam konferensi pers usai pertemuan.

Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk meminta masukan mengenai persoalan gambut di Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan diskusi melibatkan pakar dari berbagai perguruan tinggi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan pembahasan antara lain penanganan kebakaran, perlindungan ekosistem gambut, serta pemilihan tanaman dan varietas yang sesuai untuk kawasan gambut.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan bahwa pernyataannya mengenai pakar dalam sejumlah forum kerap dipelintir sehingga menimbulkan kesan dirinya tidak menghormati kalangan ahli. Ia menegaskan penghormatan terhadap keilmuan tetap menjadi bagian dari sikapnya dalam menerima masukan.

“Jadi saudara-saudara jangan salah ya menerima, karena kadang-kadang saya kalau bicara di audiens suka dipelintir, dibilang seolah saya tidak hormati pakar,” ujar Prabowo dalam video yang

diunggah Sekretariat Presiden pada Jumat (25/9/2026).

Prabowo mengatakan kebiasaannya meminta pandangan pakar telah dilakukan sejak masih menjadi perwira. Penjelasan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap pidatonya dalam HUT ke-28 PAN di JCC, Senayan, ketika ia mengkritik narasi sejumlah pihak yang mengatasnamakan kepakaran dalam mempersoalkan kebijakan strategis pemerintah.

Dalam pidato tersebut, Prabowo juga mengutip Surah Al-Baqarah ayat 191 dan menyatakan tidak mempersoalkan kritik yang datang dari pihak yang disebutnya pakar. “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi goblok,” ujar Prabowo.

Persoalan gambut dan karhutla memiliki rekam jejak panjang di Indonesia. Pada 2015, kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 2,6 juta hektar menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebakaran saat itu juga berkaitan dengan persoalan lahan gambut yang mengering dan sulit dipadamkan.

Dampak kebakaran 2015 bahkan melampaui batas Indonesia. UNEP mencatat kebakaran hutan dan gambut saat itu menimbulkan

kabut asap lintas batas serta berdampak terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Pengalaman tersebut kemudian memperkuat perhatian internasional terhadap perlindungan gambut sebagai bagian dari agenda iklim global.

Data pemerintah menunjukkan besarnya persoalan tersebut juga berkaitan dengan emisi. Dalam inventarisasi nasional, emisi dari kebakaran gambut tercatat mencapai 802,87 juta ton CO₂e pada 2015, jauh di atas 205,08 juta ton CO₂e pada 2013. Karena itu, kebijakan pengelolaan gambut tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kebakaran, tetapi juga dengan pengendalian emisi dan perlindungan ekosistem.

Dengan pembentukan BPGMN, pemerintah kini menempatkan pengelolaan gambut dan mangrove dalam satu kerangka kelembagaan nasional. Langkah tersebut sekaligus menandai upaya pemerintah memperkuat pencegahan karhutla melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, dengan masukan akademisi sebagai salah satu sumber dalam perumusan kebijakan. (*)

Prabowo Minta Perda Pembakaran Lahan Dikoreksi untuk Cegah Karhutla



Laporan: Radit

JAKARTA, BP- Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mengoreksi regulasi daerah yang masih membuka ruang bagi masyarakat membakar lahan hingga dua hektare. Ketentuan tersebut dinilai dapat menjadi celah hukum yang menyulitkan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut.

Prabowo menyampaikan hal itu dalam diskusi bersama 22 akademisi mengenai penanganan karhutla dan lahan gambut di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas langkah pencegahan sekaligus penanganan kebakaran yang berulang di sejumlah wilayah Indonesia.

Untuk memperkuat pencegahan di tingkat masyarakat, Prabowo mengatakan sekitar 1.000 perwira TNI dan Polri telah dikerahkan ke daerah. Mereka antara lain bertugas memberikan edukasi kepada warga mengenai pembukaan lahan serta pencegahan kebakaran.

Presiden juga meminta masyarakat yang membutuhkan lahan tidak membuka kawasan dengan cara membakar. Pemerintah, kata dia, dapat membantu menyediakan lahan dan sarana pendukung seperti pompa apabila warga melaporkan kebutuhannya.

“Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buat lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera,” ujar Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo menyoroti keberadaan delapan peraturan daerah (perda) di tingkat kabupaten yang menurutnya masih memberikan celah bagi pembakaran lahan hingga dua hektare. Ia meminta ketentuan tersebut dikoreksi karena berpotensi menimbulkan persoalan ketika api meluas dan sulit dikendalikan.

“Masih ada delapan perda di kabupaten, bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektare. Which is menurut saya complete nonsense,” kata Prabowo, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/9).

Menurut Prabowo, persoalan utama bukan hanya luas lahan yang dibakar, tetapi kemampuan menghentikan api setelah kebakaran berkembang. Ia mempertanyakan bagaimana satu orang dapat mengendalikan api ketika area yang terbakar sudah mencapai satu hingga dua hektare.

“Kalau dia bakar 2 hektare, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektare satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan?” ujarnya.

Pendekatan berbeda diterapkan terhadap korporasi. Prabowo menegaskan perusahaan yang membuka lahan memiliki kewajiban sesuai regulasi, antara lain membangun menara dan embung sebagai bagian dari pengendalian kebakaran. Pemerintah, menurut dia, akan

menertibkan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Persoalan karhutla bukan isu baru bagi Indonesia. Kebakaran besar 1997-1998 menjadi salah satu episode asap lintas batas paling parah di kawasan Asia Tenggara. ASEAN mencatat kebakaran ketika itu membakar lebih dari 9 juta hektare lahan dan menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, serta lingkungan yang diperkirakan melampaui 9 miliar dolar AS.

Pengalaman tersebut mendorong negara-negara ASEAN membentuk kerja sama regional. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ditandatangani pada 10 Juni 2002 dan mulai berlaku pada 25 November 2003. Indonesia kemudian meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014, dengan instrumen ratifikasi diserahkan pada Januari 2015.

Karakter lahan gambut membuat pencegahan menjadi penting karena api dapat menjalar di bawah permukaan ketika gambut mengering sehingga sulit dipadamkan. Bank Dunia mencatat kebakaran 2015-2016 memberikan dampak besar terhadap kesehatan, penghidupan, lingkungan, dan perekonomian Indonesia. Karena itu, pemerintah kini menempatkan koreksi regulasi, edukasi masyarakat, pengawasan korporasi, serta penguatan pencegahan sebagai bagian dari upaya menekan risiko karhutla. (*)

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Lantik Dewan Pengawas BLUD RSUD Bahteramas Tak Sekedar Seremonial



Laporan: Mashuri

S U L T R A , BP-Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka meminta Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bahteramas tidak berhenti pada pelantikan, tetapi segera menjalankan fungsi pengawasan untuk memperbaiki manajemen dan tata kelola rumah sakit. Penguatan tersebut dinilai penting agar pengelolaan RSUD Bahteramas semakin tertata dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Andi Sumangerukka saat melantik Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Bahteramas di Aula Bahteramas RSUD Provinsi Sultra, Rabu (23/9/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi Sultra memperkuat mekanisme pengawasan di rumah sakit milik daerah.

Dalam pelantikan itu, dr. Andi Saguni ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. Ia didampingi Muhammad Haerun, Umikun Latifa, Ruslan, dan Irwan Zainuddin sebagai anggota Dewan Pengawas. Adapun

Drs. Muh. Syaing dipercaya menjabat Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Bahteramas Provinsi Sultra.

Andi mengatakan penguatan fungsi pengawasan tersebut berkaitan dengan arahan Menteri Kesehatan yang diperolehnya ketika melakukan audiensi. Pemerintah daerah, menurut dia, didorong memperbaiki tata kelola rumah sakit dengan mempelajari pengelolaan rumah sakit yang telah berkembang lebih maju.

“Jangan sampai pelantikan ini hanya seremonial. Setelah dilantik, Dewan Pengawas harus menjalankan fungsi pengawasannya,” kata Andi dalam sambutannya.

Salah satu pendekatan yang didorong adalah pembelajaran dari rumah sakit yang telah mengalami perkembangan dalam tata kelola dan pelayanan. Andi mencontohkan Rumah Sakit Dharmas dan Rumah Sakit Cipito di Jakarta yang disebutkan telah mengalami perubahan dalam pengelolaan dibandingkan kondisi sebelumnya.

Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra

meminta dukungan Kementerian Kesehatan untuk memperlengkapi unsur pengawas. Kehadiran unsur tersebut diharapkan dapat membantu proses evaluasi sekaligus memberikan pembelajaran mengenai pengelolaan rumah sakit kepada jajaran RSUD Bahteramas.

“Manajemen itu salah satu bagian penting dalam pengelolaan rumah sakit. Karena itu, kita membutuhkan pengawasan dan pembelajaran agar pengelolaannya semakin baik,” ujar Andi.

Secara historis, penguatan tata kelola rumah sakit pemerintah merupakan bagian dari perkembangan konsep badan layanan publik di Indonesia. Sejak kerangka Badan Layanan Umum diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, rumah sakit pemerintah didorong memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan tetap mempertanggungjawabkan kinerja dan pelayanan kepada publik.

Perkembangan serupa juga berlangsung secara internasional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) selama beberapa

dekade mendorong penguatan tata kelola fasilitas kesehatan, antara lain melalui akuntabilitas, pengawasan, mutu pelayanan, serta penggunaan sumber daya yang efektif. Prinsip tersebut menempatkan tata kelola sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.

Dalam konteks RSUD Bahteramas, keberadaan Dewan Pengawas diharapkan dapat memperkuat proses evaluasi dan pengawasan terhadap manajemen rumah sakit. Gubernur juga berharap unsur yang dilantik mampu memberikan kontribusi konkret dalam pembenahan tata kelola, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif.

Andi Sumangerukka meminta Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah Provinsi Sultra berharap penguatan pengawasan tersebut bermuara pada pengelolaan RSUD Bahteramas yang lebih tertata dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (*)

Pengurus Masjid Al-Alam Dikukuhkan, Gubernur Sultra Tekankan Kebenaran



Laporan: Lisna

SULTRA, BP-Pengurus Masjid Al-Alam Kendari masa bakti 2026-2031 resmi dikukuhkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka di Masjid Al-Alam, Rabu (23/9/2026). Dalam momentum tersebut, Andi meminta pengurus menjadikan kejujuran dan kebenaran sebagai pijakan dalam mengelola amanah sekaligus memperkuat fungsi masjid bagi masyarakat.

Menurut Andi, pengelolaan masjid tidak berhenti pada penyelenggaraan ibadah. Masjid juga mempunyai ruang sosial dan pembinaan umat yang dapat digunakan untuk membangun persaudaraan, kepedulian, serta keteladanan di tengah masyarakat. “Kejujuran dan kebenaran harus menjadi bagian dari setiap langkah dalam kehidupan dan hubungan dengan sesama,” kata Andi dalam arahannya.

Ia mengaitkan penguatan fungsi masjid dengan visi pembangunan Sultra yang aman, sejahtera, dan religius. Karena itu, pengurus diminta menjadikan kegiatan keagamaan sebagai sarana untuk mendorong masyarakat memperbaiki diri sekaligus memperkuat kehidupan sosial.

Andi juga memberi perhatian khusus kepada generasi muda. Menurut dia, pengurus perlu menghadirkan pembinaan yang menanamkan keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama mengenai kejujuran, kebenaran, kemampuan bersosialisasi, dan kehidupan ber-

masyarakat.

“Masjid harus menjadi ruang yang mendorong masyarakat untuk terus memperbaiki diri dan menerapkan nilai-nilai kebaikan,” ujarnya.

Dalam konteks sejarah Islam, gagasan tersebut memiliki akar panjang. Pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, masjid berkembang bukan hanya sebagai tempat salat, tetapi juga menjadi pusat kegiatan umat, pendidikan, komunikasi sosial, dan pelayanan kemasyarakatan. Kementerian Agama mencatat fungsi sosial dan pembinaan tersebut sebagai bagian penting dari sejarah perkembangan masjid pada periode Madinah.

Masjid Al-Alam sendiri memiliki latar sejarah yang cukup khas di Indonesia. Masjid yang berada di tengah Teluk Kendari itu mulai dibangun pada 2010 pada masa pemerintahan Gubernur Sultra Nur Alam dan penggunaannya kemudian diresmikan pada 2018. Data Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama juga mencatat Al-Alam berdiri sejak 2010 dan memiliki kegiatan ibadah serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

Secara arsitektural, posisi Al-Alam di perairan Teluk Kendari membuatnya dikenal sebagai masjid terapung sekaligus salah satu ikon Kota Kendari. Sejumlah sumber mencatat masjid tersebut memiliki empat menara dan dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan, Mursyid Mustafa.

Fenomena masjid

yang berdiri di atas atau di tepi perairan juga memiliki preseden internasional. Di Jeddah, Arab Saudi, Masjid Al-Rahma yang dibangun pada 1985 dikenal sebagai salah satu masjid terapung di Laut Merah. Sementara Masjid Hassan II di Casablanca, Maroko, yang diresmikan pada 1993, berdiri di tepi Samudra Atlantik dan dirancang dengan bagian bangunan berada di atas air.

Dalam kepengurusan baru, H. Akhmad Aljufri dipercaya sebagai Ketua, didampingi Drs. H. Ryha Madi sebagai Wakil Ketua I, Dr. H. Musadar Mappasomba, SP., MP. sebagai Wakil Ketua II, dan Prof. Dr. H. Nur Alim, M.Pd. sebagai Wakil Ketua III. Prof. Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH. menjadi Sekretaris dengan H. Saido Bonsai, S.Sos., M.Si., Dr. H. Muhammad Ali-fuddin, M.Ag., dan H. Daryodi, S.Ag. sebagai Wakil Sekretaris I, II, dan III. Posisi Bendahara dijabat Drs. H. Andi Muh. Toaso, MM., dengan Syamsul Anam, SE., M.AP. sebagai Wakil Bendahara.

“Ketulusan dalam menjalankan amanah perlu diawali dengan niat yang baik serta dilandasi nilai-nilai ibadah,” kata Andi. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjadikan Masjid Al-Alam sebagai pusat ibadah sekaligus pembinaan umat yang manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat Sultra. (*)

Bupati Azhari Dorong Perusahaan dan Pekerja Pahami Aturan Hubungan Industrial



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mendorong perusahaan dan pekerja memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan hubungan industrial, terutama Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Penguatan pemahaman itu dilakukan melalui sosialisasi yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Buton Tengah, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Mediator Hubungan Industrial Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Mohammadin, S.H., M.Si., M.H., dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Baubau Musriati sebagai pemateri. Sosialisasi diikuti pimpinan dan perwakilan perusahaan serta unsur pemerintah daerah.

Bupati Buton Tengah Dr. Azhari, S.STP., M.Si., yang membuka kegiatan itu, menempatkan PP dan PKB sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian mengenai hak dan ke-

wajiban pengusaha serta pekerja. Menurut dia, kejelasan aturan di tempat kerja diperlukan untuk mengurangi potensi perselisihan hubungan industrial.

“PP dan PKB memiliki posisi penting dalam memberikan kepastian atas hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja,” kata Azhari.

Ia meminta perusahaan dan pekerja tidak hanya memahami keberadaan kedua dokumen tersebut, tetapi juga mengetahui tata cara penyusunan dan penerapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap aturan, menurut dia, harus berjalan bersama dengan komunikasi yang terbuka antara kedua pihak.

Azhari juga mendorong terciptanya komunikasi yang konstruktif, profesionalitas, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah daerah memandang hubungan industrial yang kondusif sebagai salah satu unsur yang dapat menunjang aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah. “Hubungan indus-

trial yang sehat tidak hanya menciptakan suasana kerja yang kondusif, tetapi juga mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Penguatan regulasi hubungan kerja tersebut berlangsung dalam konteks sistem ketenagakerjaan Indonesia yang telah lama menempatkan hubungan antara pengusaha dan pekerja sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi salah satu landasan utama pengaturan hubungan kerja, termasuk hubungan industrial, meskipun sejumlah ketentuannya kemudian mengalami perubahan melalui regulasi berikutnya.

Secara historis, gagasan hubungan industrial juga berkembang dalam sistem ketenagakerjaan internasional. Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) yang berdiri pada 1919 menempatkan dialog sosial, perlindungan pekerja, dan kerja sama antara pe-

merintah, pengusaha, serta pekerja sebagai bagian penting dalam tata kelola ketenagakerjaan. Perkembangan tersebut turut memengaruhi praktik hubungan industrial di berbagai negara.

Di Buton Tengah, penguatan pemahaman tersebut turut melibatkan para camat se-Kabupaten Buton Tengah dan Koordinator SPKG Buton Tengah. Plt. Kepala Disnakertrans Buton Tengah Sahrudin, S.Pd., M.M., juga hadir bersama unsur terkait dalam kegiatan tersebut.

Melalui sosialisasi itu, Disnakertrans Buton Tengah berupaya mempertemukan pemahaman perusahaan dan pekerja mengenai ketentuan ketenagakerjaan. Kesamaan pemahaman diharapkan menjadi dasar bagi hubungan kerja yang lebih transparan, kondusif, harmonis, dan berkeadilan.

“Komunikasi yang terbuka dan konstruktif perlu dibangun bersama, disertai profesionalitas serta peningkatan produktivitas tenaga kerja,” kata Azhari. (*)

KPK Dampingi Buton Susun Aksi Perbaikan Tata Kelola dan Integritas 2026



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton menyiapkan rencana aksi tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) 2026 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat budaya kerja yang berintegritas di lingkungan pemerintah daerah.

Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat VVIP Anjungan Kantor Bupati Buton, Pasarwajo, Kamis (17/9/2026), dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Pertemuan dipimpin Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH, didampingi Sekda Buton La Ode Syamsuddin, SPd, MSI.

Bagi Pemkab Buton, pendampingan tersebut menjadi ruang evaluasi untuk mengidentifikasi aspek penyelenggaraan pemerintahan yang masih membutuhkan pembenahan. Hasil SPI tidak hanya ditempatkan sebagai ukuran integritas, tetapi juga sebagai bahan untuk menentukan langkah perbaikan tata kelola dan pelayanan publik.

“Kita berharap survei yang akan dilakukan ini dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang masih perlu diperbaiki dapat kita benahi bersama, karena kemajuan Kabupaten Buton ada di tangan kita semua,” kata Alvin.

KPK menempatkan SPI sebagai instrumen untuk memetakan tingkat integritas dan risiko korupsi di kementerian, lembaga, serta pemerintah

daerah. Survei tersebut menggabungkan masukan dari unsur internal, masyarakat sebagai pengguna layanan, dan kalangan ahli atau pemangku kepentingan.

Secara nasional, pelaksanaan SPI telah berkembang sejak 2016. KPK mencatat survei tersebut sebelumnya berangkat dari Survei Integritas, kemudian pada 2016 berubah menjadi SPI dan pada 2019 dinaikkan ke level strategis sebagai kegiatan nasional. Sejak 2021, pelaksanaannya dilakukan secara masif dan menjadi salah satu basis pengukuran integritas nasional.

Skala pelaksanaan itu terus meluas. Pada SPI 2025, KPK mencatat 107 kementerian/lembaga, 546 pemerintah daerah, dan empat BUMN mengikuti survei. Indeks Integritas Nasional 2025 berada di angka 72,32, sementara indeks pemerintah daerah tercatat 71,33 dari 546 instansi.

Data tersebut menunjukkan bahwa penguatan integritas masih menjadi agenda berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. KPK dalam laporan tahunannya juga mencatat masih adanya risiko suap, pungutan liar, serta persoalan pada pengadaan barang dan jasa yang perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan sistem.

Dalam konteks Buton, Tim KPK yang hadir terdiri atas Tenaga Ahli SPI KPK Direktorat Monitoring Kedeputan Bidang Pencegahan dan Monitoring Muhammad Yogi, Tenaga Ahli Madya Tindak Lanjut SPI Fachruddin Putra Jaya, serta Asisten

Tenaga Ahli Tindak Lanjut SPI Jessica Rahma Sekar Ayu.

Fachruddin menjelaskan, pendampingan tersebut tidak dimaksudkan semata-mata untuk menilai pemerintah daerah. Menurut dia, proses tersebut juga merupakan bagian dari upaya mendorong perbaikan yang dapat dilakukan pemerintah daerah berdasarkan hasil dan rencana tindak lanjut SPI.

“Kami datang sebagai kawan untuk bersama-sama memperbaiki apa yang sudah direncanakan ke depan. Harapannya, pada survei tahun depan akan ada perbaikan, baik dari sisi tata kelola maupun budaya kerja,” ujarnya.

Upaya membangun integritas pemerintahan juga memiliki konteks internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) menjadikan pencegahan korupsi, penguatan integritas sektor publik, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian penting dalam kerangka pemberantasan korupsi global. Kerangka tersebut menempatkan pencegahan dan pembenahan institusi sebagai bagian dari upaya jangka panjang, bukan semata penindakan setelah korupsi terjadi.

Karena itu, pendampingan SPI di Buton diarahkan pada konsistensi perbaikan. KPK menekankan integritas sebagai fondasi tata kelola pemerintahan, sedangkan Pemkab Buton diharapkan menerjemahkan hasil evaluasi ke dalam langkah konkret yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. (*)

DP3AKB Baubau Bidik 97 Akseptor Baru hingga Puncak Hari Kontrasepsi 2026



Peliput: Andina L

BAUBAU, BP- Sebanyak 97 Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi sasaran peserta KB baru dalam Pelayanan KB Serentak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Baubau sepanjang 7 September hingga 7 Oktober 2026. Program tersebut digelar untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi sekaligus memperkuat perencanaan keluarga.

Kepala DP3AKB Kota Baubau Abdul Rahman, S.Pd., M.Si., mengatakan pelayanan tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar jumlah peserta baru. Edukasi mengenai perencanaan keluarga dan pemilihan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.

“Pelayanan KB serentak ini merupakan bagian dari upaya memperkuat akses pelayanan KB yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur dan meningkatkan capaian peserta KB baru,” kata

Abdul Rahman dalam keterangan pers, Kamis (24/9/2026).

Menurut Abdul Rahman, pelayanan serentak menjadi momentum untuk mendekatkan layanan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. PUS diberikan informasi agar dapat memahami pilihan kontrasepsi dan memperoleh metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka melalui pelayanan yang tersedia.

Pelaksanaan program berlangsung selama sebulan di wilayah Kota Baubau dan seluruh hasil pendataan serta pelayanan yang terealisasi di lapangan dicatat secara terintegrasi melalui aplikasi SIGA BKKBN. Pencatatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan capaian pelayanan KB selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Program itu juga ditempatkan dalam momentum peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia atau World Contraception Day (WCD), yang diperingati setiap 26 September. Peringatan tersebut pertama kali diluncurkan secara global pada 26 Sep-

tember 2007 oleh organisasi-organisasi keluarga berencana internasional dengan misi meningkatkan kesadaran mengenai kontrasepsi dan membantu masyarakat membuat pilihan yang terinformasi terkait kesehatan reproduksi.

Di Indonesia, peringatan WCD telah menjadi salah satu momentum penguatan pelayanan KB. Pada 2024, misalnya, pelayanan KB serentak secara nasional yang dicatat hingga 24 September mencapai 1.880.577 akseptor atau 132,75 persen dari target 1.416.663 akseptor di 34 provinsi. Data tersebut menunjukkan bahwa peringatan WCD juga dimanfaatkan sebagai penggerak pelayanan KB secara luas.

Secara global, kebutuhan terhadap akses kontrasepsi masih menjadi agenda kesehatan masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat dari sekitar 1,9 miliar perempuan usia reproduktif 15-49 tahun pada 2021, sebanyak 1,1 miliar membutuhkan layanan keluarga berencana. Dari

jumlah itu, 874 juta menggunakan metode kontrasepsi modern, sedangkan 164 juta masih memiliki kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi.

WHO juga menempatkan keluarga berencana sebagai bagian dari akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memungkinkan seseorang menentukan jumlah dan jarak kelahiran berdasarkan pilihan yang diinformasikan. Beragam metode kontrasepsi tersedia, tetapi pilihannya perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan konsultasi dengan tenaga kesehatan.

Rangkaian pelayanan DP3AKB Kota Baubau diadwalkan berakhir pada 7 Oktober 2026, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia. Abdul Rahman berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kontribusi pemerintah daerah dalam membentuk keluarga yang terencana, sehat, dan berkualitas.

“Dengan pelayanan dan informasi yang memadai, masyarakat dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing,” ujar Abdul Rahman. (*)

RME SATUSEHAT Terintegrasi, BPJS Kesehatan Dorong Klaim Berbasis Mutu



JAKARTAIntegrasi Rekam Medis Elektronik (RME) melalui SATUSEHAT mulai diarahkan tidak sekadar untuk memudahkan pertukaran informasi pasien, tetapi juga menjadi basis pengukuran mutu pelayanan dan pembiayaan kesehatan berbasis value serta outcome. Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan mengintegrasikan pemanfaatan data tersebut dalam proses pelayanan dan klaim pembiayaan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Dr. Prihati Pujowaskito mengatakan, BPJS Kesehatan saat ini bekerja sama dengan sekitar 3.200 rumah sakit dan 23.000 klinik. Dengan integrasi SATUSEHAT RME, rekam medis elektronik dapat dibaca sebagai bagian dari proses klaim pelayanan kesehatan.

“Dengan peluncuran RME ini, kami sepakat untuk bergabung bersama-sama dengan SATUSEHAT agar BPJS Kesehatan dapat membaca rekam medis elektronik sebagai bagian dari proses klaim pembiayaan kesehatan,” ujar Prihati dalam peluncuran SATUSEHAT RME di Auditorium dr. J. Leimena, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Selama ini, proses klaim masih menghadapi persoalan dokumentasi, antara lain dokumen yang dikirim dalam format PDF. Integrasi RME memungkinkan informasi pelayanan tersusun lebih sistematis sehingga dapat digunakan untuk melihat kesesuaian clinical pathway, lama perawatan, outcome pasien, keterlibatan tenaga kesehatan, hingga komponen pembiayaan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemanfaatan data RME memungkinkan pelayanan kesehatan dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai pasien, bukan hanya berdasarkan tindakan yang diberikan. “Dengan data yang ada, kita dapat melihat apakah pelayanan sudah sesuai dengan outcome, clinical pathway, dan standar yang

ditetapkan,” kata Budi.

Kementerian Kesehatan sebelumnya memperkenalkan SATUSEHAT pada 26 Juli 2022 sebagai platform integrasi data layanan kesehatan nasional. Pengembangan itu merupakan bagian dari pilar keenam transformasi kesehatan, yakni transformasi teknologi kesehatan. Pada akhir 2022, Kemenkes mencatat 2.893 puskesmas dan 370 rumah sakit di Jawa-Bali telah siap terintegrasi dengan SATUSEHAT.

Tonggak regulasinya diperkuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Kemenkes ketika itu menargetkan penerapan RME di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sekaligus membangun standarisasi dan interoperabilitas pertukaran data kesehatan.

Secara global, digitalisasi rekam medis juga berkembang sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan. WHO mencatat adopsi sistem rekam kesehatan elektronik nasional terus meningkat dan menempatkan interoperabilitas, standar data, tata kelola, infrastruktur, serta kapasitas tenaga kerja sebagai bagian penting dalam pembangunan ekosistem kesehatan digital.

WHO juga menempatkan rekam kesehatan elektronik sebagai instrumen untuk menyediakan informasi pasien secara cepat dan terstruktur bagi pengguna yang berwenang. Pada 2020, WHO mengadopsi Global Strategy on Digital Health, yang kemudian diperbarui untuk periode 2020-2027, dengan tujuan mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan hasil kesehatan.

Bagi Indonesia, pemanfaatan RME kini diarahkan melampaui kebutuhan administratif. Data yang terintegrasi dapat digunakan untuk pelayanan, proses klaim, evaluasi clinical pathway, riset, dan perbandingan outcome antar-fasilitas kesehatan. “Ke depan, BPJS Kesehatan akan mengedepankan pembiayaan pelayanan kesehatan yang lebih value based medicine,” ujar Prihati. (*)

PT FAREN GRAFIKA

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

ICW Soroti Dugaan Jual-Beli Fasilitas Narapidana di Lapas Cibinong



Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons temuan Ombudsman terkait adanya bangunan mewah dengan fasilitas lengkap di Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, yang diduga dimanfaatkan oleh narapidana.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Temuan bangunan mewah dengan fasilitas lengkap di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, memunculkan kembali persoalan lama tentang perlakuan khusus terhadap narapidana. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai temuan Ombudsman tersebut perlu diperiksa dari sisi potensi suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan.

ICW mengaitkan temuan itu dengan dua dari lima modus korupsi di lembaga pemasyarakatan yang telah mereka petakan sejak 2011, yakni pemberian fasilitas atau perlakuan khusus kepada narapidana serta pemberian izin keluar lapas yang kemudian disalahgunakan.

Menurut ICW, fasilitas khusus dapat berbentuk sel berbeda dari narapidana lain, penggunaan perangkat elektronik, makanan tertentu, ruang yang lebih nyaman, hingga akses keluar-masuk lapas di luar alasan yang diperbolehkan. Karena itu, persoalan di Cibinong dinilai perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui siapa yang memberikan fasilitas, kepada siapa fasilitas diberikan, serta apakah terdapat imbalan di baliknya.

“Dugaan adanya suap dan gratifikasi perlu diperiksa untuk dua hal,” tulis ICW dalam keterangannya, Jumat (25/9).

Catatan sejarah pemasyarakatan Indonesia menunjukkan bahwa praktik serupa pernah berujung pada perkara pidana. Pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terkait Lapas Sukamiskin, Bandung. KPK menyebut narapidana dapat membayar sekitar Rp200 juta hingga Rp500 juta untuk memperoleh fasilitas tambahan, sementara perkara tersebut juga berkaitan dengan pemberian kemudahan untuk keluar dari lapas.

Kasus Gayus Tambunan juga menjadi salah satu contoh yang kerap dirujuk dalam pembahasan pengawasan narapidana. Pada 2010, foto Gayus yang saat itu berstatus tahanan berada di arena tenis di Nusa Dua, Bali, menjadi perhatian publik. Gayus kemudian mengakui bahwa pria dalam foto tersebut adalah dirinya. Pada 2015, foto Gayus berada di sebuah restoran di Jakarta kembali memicu sorotan; pihak Lapas Sukamiskin menjelaskan bahwa ia keluar pada 9 September 2015 untuk memenuhi panggilan Pengadilan Agama Jakarta Utara.

ICW menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dugaan penyalahgunaan fasilitas dan izin keluar lapas tidak semestinya dipandang sebagai persoalan administratif belaka. Lembaga itu meminta kemungkinan adanya pembayaran, transaksi, atau aliran uang diperiksa untuk mengetahui apakah terjadi praktik pemberian privilege kepada narapidana tertentu.

“Termasuk memeriksa apakah terdapat transaksi, aliran uang, atau penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat maupun petugas pemasyarakatan,” tulis ICW.

Persoalan tersebut juga memiliki dimensi internasional. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam panduannya mengenai antikorupsi di penjara mencatat bahwa korupsi di lingkungan pemasyarakatan dapat memengaruhi kondisi tahanan, membuka ruang bagi pemberian suap untuk layanan tertentu, bahkan dalam kondisi ekstrem dapat memfasilitasi pelarian dan operasi kejahatan dari dalam penjara.

Atas dasar itu, ICW mendesak KPK ikut menelusuri dugaan transaksi di Lapas Cibinong. ICW juga mengingatkan agar pemeriksaan tidak berhenti pada perdebatan

mengenai status bangunan tersebut sebagai rumah dinas atau fasilitas lain, melainkan diarahkan untuk mengungkap kemungkinan adanya jual-beli fasilitas.

“Substansi yang harus dibongkar adalah dugaan jual-beli privilege di dalam lapas,” tulis ICW, seraya mempertanyakan siapa yang membayar, siapa yang menerima, siapa yang memberikan fasilitas, dan bagaimana fasilitas tersebut diberikan kepada narapidana tertentu.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendatangi Lapas Cibinong pada Jumat (25/9) bersama Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Internal Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto. Keduanya melakukan investigasi untuk memastikan peruntukan bangunan yang ditemukan Ombudsman.

“Ini kita akan dalam apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain,” kata Agus kepada wartawan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan fungsi bangunan dan fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong sekaligus menindaklanjuti temuan Ombudsman. (*)

Kepala Dapur SPPG Surabaya Jadi Tersangka Penggelapan Minyak Goreng



Seorang kepala bagian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya, Jawa Timur, ditangkap dan ditetapkan tersangka usai diduga menggelapkan delapan jeriken minyak goreng dari tempat kerjanya untuk dijual kembali.

Laporan: Amran

SURABAYA, BP-Polisi menetapkan Hendi Wirawan bin Soekirno (32), kepala bagian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Raya Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan minyak goreng. Hendi diduga memanfaatkan jadwal piket malam untuk mengambil minyak dari tempat kerjanya dan menjualnya kembali.

Kapolsek Sawahan Kopol Muljono mengatakan, pengungkapan perkara tersebut dilakukan Unit Reskrim Polsek Sawahan setelah menerima laporan dari seorang saksi mengenai dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Hendi.

Aksi tersebut diduga berlangsung ketika Hendi menjalankan piket malam, yakni mulai pukul 23.00 hingga 09.00 WIB. Polisi menyebut tersangka memindahkan minyak goreng sisa dari wadah ke dalam kantong plastik hitam berukuran besar.

Plastik berisi minyak itu kemudian dikeluarkan dari area SPPG dan disembunyikan di dekat tempat sampah di luar kantor. Pada pagi hari, barang tersebut diduga diambil kembali oleh Hendi untuk kemudian dijual kepada orang lain.

Polisi mencatat aksi tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, masing-masing pada 11, 16, dan 18 September 2026. Dari kegiatan itu, tersangka disebut mem-

peroleh keuntungan sebesar Rp1,2 juta yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Tersangka melakukan penggelapan minyak goreng berjumlah 8 jeriken masing-masing 18 liter. Dari hasil penggelapan tersebut pelaku mendapat keuntungan uang senilai Rp1,2 juta,” kata Muljono, Jumat (25/9).

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan rekaman kamera pemantau atau CCTV dari lokasi kejadian. Rekaman tersebut menjadi salah satu barang bukti dalam proses penyidikan.

Hendi diketahui telah menjabat sebagai kepala bagian dapur SPPG sejak Mei 2026. Posisi tersebut membuatnya memiliki akses terhadap aktivitas dan bahan yang berada di lingkungan dapur tempat ia bekerja.

“Polsek Sawahan telah melakukan pengungkapan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan,” ujar Muljono.

Perkara tersebut terjadi ketika SPPG menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang dijalankan Badan Gizi Nasional itu mulai dilaksanakan secara bertahap pada 6 Januari 2025 melalui SPPG. Pada tahap awal, terdapat 190 SPPG yang melayani sekitar 570.000

penerima manfaat.

Dalam perkembangan bangannya, jumlah SPPG meningkat tajam. BGN mencatat pada awal Januari 2026 sebanyak 19.188 SPPG telah beroperasi di 38 provinsi dengan sekitar 55,1 juta penerima manfaat. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya skala pengelolaan bahan pangan dan operasional dapur dalam program tersebut.

Atas perbuatannya, Hendi dijerat Pasal 488 juncto Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang sebagai perbuatan berlanjut. Polisi masih melanjutkan proses hukum terhadap tersangka.

Program MBG sendiri merupakan program nasional yang mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 melalui SPPG. Dalam waktu satu tahun, jumlah unit pelayanan tersebut berkembang dari 190 menjadi 19.188 unit pada awal Januari 2026.

Sementara itu, minyak goreng memiliki posisi penting dalam konsumsi masyarakat Indonesia. Data BPS bahkan memasukkan minyak goreng sebagai salah satu komoditas bahan pokok yang dicatat dalam konsumsi nonrumah tangga, bersama beras, daging, telur, bawang, cabai, gula, tepung, dan komoditas pangan lainnya. (*)

Negara Akui Tari Fomani dan Meta’u’a, Tradisi Leluhur Masyarakat Siompu di Buton Selatan

sertifikasi tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab masyarakat untuk memastikan tradisi tidak berhenti pada pengakuan administratif. “Hal ini sekaligus menjadi amanah bagi seluruh warga untuk terus jaga, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya kepada generasi mendatang,” ujarnya. Acara adat tersebut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan

Provinsi Sulawesi Tenggara Ridwan Badala, Wakil Bupati Buton Selatan La Ode Risawal, anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan, kepala organisasi perangkat daerah, Plt. Sekretaris DPRD, Camat Siompu, para kepala desa, tokoh adat, pendidik, serta masyarakat adat Pulau Siompu. Kehadiran mereka menegaskan keterlibatan berbagai unsur dalam pelestarian budaya daerah.

Pengakuan terhadap Tari Fomani dan Meta’u’a sekaligus menempatkan masyarakat sebagai pihak penting dalam keberlanjutan warisan tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan tradisi tetap hidup dalam praktik masyarakat, dipahami generasi muda, dan tidak sekadar tercatat dalam dokumen pengakuan budaya pemerintah.(*)

Delapan Titik Kebakaran Lahan Ditangani Damkar Baubau pada 22-24 September, Warga Kembali Diingatkan Tidak Bakar Lahan

penanganan meliputi Jalan Padat Karya Waborobo, TPU Wanajati Kelurahan Tampuna, Jalan Cendana Kelurahan Kadolo, Jalan Labisana Kelurahan Baadia, Waborobo, Benteng Sorawolio, Tanggul Pemotongan Bataraguru, serta Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa. “Sebagian besar kejadian merupakan imbas pembakaran lahan dan sampah tanpa pengawasan,” kata Ali Hasan dalam siaran pers, Jumat (25/9/2026).

Dari sejumlah kejadian itu, kebakaran dengan area terdampak terbesar terjadi di TPU Wanajati, Kelurahan Tampuna, sekitar 1,5 hektare, dan Jalan Padat Karya Waborobo sekitar satu hektare. Di Waborobo, pada kejadian malam hari, api kembali membakar lahan sekitar 50 x 30 meter. Sementara kebakaran di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Sulaa, berdampak pada area sekitar 20 x 30 meter.

Petugas mengerahkan kekuatan berbeda sesuai lokasi kejadian. Penanganan di Jalan Padat Karya Waborobo menggunakan dua unit kendaraan Mako dengan lima personel, sedangkan TPU Wanajati ditangani satu unit Posko Bungi dengan lima personel. Di Jalan Cendana, satu unit Posko Wolio dengan lima personel diterjunkan, sementara Jalan Labisana menggunakan dua unit

Mako dengan enam personel. Kebakaran di Waborobo pada malam hari ditangani satu unit Mako dengan enam personel, Benteng Sorawolio satu unit Posko Wolio dengan lima personel, Tanggul Pemotongan Bataraguru satu unit Mako dengan lima personel, dan Jalan Dayanu Ikhsanuddin satu unit Mako dengan delapan personel.

Selain pemadaman, petugas memberikan layanan kedaruratan kepada warga. Damkar mengantar pasien darurat dari Kelurahan Tomba ke Rumah Sakit Palagimata serta membantu melepaskan cincin dari jari seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun asal Desa Kamekanta, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton. Kecepatan laporan masyarakat juga disebut membantu petugas tiba di lokasi lebih cepat, dengan dukungan relawan dan kepolisian.

Ali Hasan mengatakan pembakaran biasanya dilakukan untuk membuka lahan perkebunan, membersihkan halaman, atau mempersiapkan pembangunan perumahan. Dalam kondisi lingkungan yang kering, api dapat lebih cepat menjalar apabila tidak diawasi. “Masyarakat perlu memastikan api tidak merembet dan bara benar-benar padam setelah pembakaran selesai,” ujarnya.

Risiko tersebut memiliki konteks yang lebih luas. Di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan menjadi persoalan berulang, terutama pada periode kering. Salah satu episode terburuk terjadi pada 1997-1998 ketika kebakaran besar di Indonesia menimbulkan kabut asap lintas batas hingga negara-negara Asia Tenggara. Secara global, kebakaran vegetasi juga merupakan fenomena alam dan lingkungan yang telah lama terjadi, tetapi perubahan penggunaan lahan, kekeringan, dan kondisi cuaca dapat meningkatkan risiko serta dampaknya. Karena itu, pencegahan pada tingkat tapak tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian kebakaran.

Damkar dan Penyelamatan Kota Baubau mengimbau warga tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan. Jika pembakaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, warga diminta memperhatikan kondisi lingkungan, menyiapkan langkah pencegahan agar api tidak merembet, serta memastikan seluruh bara telah padam sebelum meninggalkan lokasi. “Jangan meninggalkan pembakaran tanpa pengawasan,” kata Ali Hasan.(*)

Meta’u’a Binawakili Hidupkan Jejak 400 Tahun Armada Jawa di Siompu, Dimeriahkan 120 Penari

da yang diperkirakan berasal dari Pulau Jawa.

Meta’u’a diikuti masyarakat dari enam desa yang tergabung dalam persekutuan Binawakili, yakni Biwinapada, Nggulang-gula, Wakinamboro, Batuawu, Lapara, dan Tongali. Menurut lembaga adat setempat, kedatangan armada tersebut diperkirakan terjadi sekitar 400 tahun lalu dan menjadi awal terbentuknya hubungan persahabatan dengan masyarakat asli Siompu.

Ketua Lembaga Adat Binawakili, H. Pomili Womal, S.Pd., SD., mengatakan hubungan yang berawal dari kedatangan rombongan tersebut kemudian berkembang menjadi ikatan sosial dan persaudaraan yang diwariskan lintas generasi. “Setelah armada itu mendarat, mereka kemudian menyeberang dan menetap di tanah ini hingga akhirnya menyatu dengan kita. Ikatan persaudaraan itulah yang terus dijaga dan diwariskan hingga hari ini,” ujarnya.

Menurut Pomili, pelestarian tradisi menjadi penting karena sejarah lokal tidak hanya tersimpan dalam catatan tertulis, tetapi juga dalam praktik budaya masyarakat. Karena itu, Meta’u’a diarahkan untuk memperkenalkan kembali asal-usul dan nilai yang diwariskan leluhur kepada generasi muda.

Tradisi tersebut berlangsung melalui sejumlah prosesi, antara lain penyambutan tamu kehormatan dengan pemberian kalung penghormatan, peragaan silat tradisional, serta pertunjukan tari kolosal. Prosesi adat itu dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Ridwan Badala, Wakil Bupati Buton Selatan La Ode Risawal, Sekretaris Daerah Buton Selatan La Ode Harwanto, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, Plt. Sekretaris DPRD, Camat Siompu, para kepala desa, tokoh adat, pendidik, dan masyarakat Pulau Siompu.

Secara historis, hubungan antar-pulau di Nusantara telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya Indonesia sebagai negara pada 1945. Jalur laut menjadi salah satu penghubung utama perpindahan manusia, barang, bahasa, dan kebudayaan di kawasan kepulauan. Pada masa perdagangan maritim Asia, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan wilayah kepulauan lainnya terhubung melalui jaringan pelayaran yang memungkinkan terjadinya pertemuan antarmasyarakat. Konteks sejarah maritim tersebut menjadi latar penting dalam memahami berbagai tradisi lokal yang menyimpan ingatan tentang kedatangan kelompok dari wilayah lain.

Pomili menyebut Meta’u’a bukan sekadar perayaan, melainkan bagian dari usaha mempertahankan identitas masyarakat Binawakili. “Kegiatan seperti ini bukan sekadar pesta biasa, melainkan upaya memperkenalkan kembali jati diri dan warisan leluhur kepada generasi penerus,” katanya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, para tetua adat, dan masyarakat yang mendukung pelaksanaan tradisi tersebut.

Bagi masyarakat Binawakili, pelaksanaan Meta’u’a menjadi ruang untuk mempertemukan sejarah, kesenian, dan kehidupan sosial dalam satu perhelatan adat. Tradisi itu sekaligus menunjukkan bagaimana memori mengenai hubungan masyarakat Siompu dengan pendatang dari luar pulau terus dipelihara melalui praktik budaya dan diwariskan kepada generasi berikutnya.(*)

Pemkab Buton Tengah dan BPN Percepat Sertifikasi 2.000 Bidang Tanah, Bupati Azhari Akan Serahkan 1.500 Sertifikat

fikat-sertifikat itu di desa-desa yang akan dituju,” kata Azhari se usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Buton Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah, Kamis (24/9/2026).

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mempercepat legalisasi aset masyarakat sekaligus penataan aset pemerintah daerah. Ruang lingkupnya meliputi percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah, pemanfaatan data serta informasi pertanahan, integrasi perpajakan pertanahan, dan penanganan sengketa atau persoalan tanah.

Pemkab Buton Tengah dan Kantor Pertanahan juga akan mengidentifikasi MBR yang belum memiliki sertifikat karena keterbatasan kemampuan ekonomi dan biaya pengurusan. Pendekatan tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati atau kelola.

Azhari mengatakan pemerintah daerah akan mengupayakan penambahan

kuota sertifikasi pada tahun berikutnya dengan melibatkan Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait. Selain legalisasi tanah warga, program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat sertifikasi aset Pemkab Buton Tengah.

“Harapan saya semua warga Buton Tengah memiliki sertifikat lahan tempat tinggalnya dan sertifikat kebunnya,” ujar Azhari.

Secara historis, sertifikasi tanah menjadi bagian penting dari kebijakan pertanahan di Indonesia karena dokumen hak atas tanah memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar administrasi pertanahan. Secara internasional, kepastian hak atas tanah juga dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam tata kelola lahan, pengurangan konflik pertanahan, dan penguatan akses ekonomi masyarakat. Di tingkat daerah, kerja sama Pemkab Buton Tengah dan Kantor Pertanahan melalui MoU pada 24 September 2026 diarahkan untuk menerjemahkan kebutuhan tersebut melalui percepatan layanan sertifikasi bagi masyarakat dan legalisasi aset pemerintah.(*)

Dukcapil Buton Selatan Genjot IKD, Aktivasi Warga Baru 5,94 Persen

Percepatan aktivasi mulai terlihat setelah IKD diberlakukan sebagai syarat mutlak bagi 2.194 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Buton Selatan. Kebijakan itu mendorong tingkat kepatuhan aktivasi di kalangan calon PPPK mencapai sekitar 95 persen. Koordinasi mengenai pelaksanaannya dilakukan Disdukcapil bersama Sekretaris Daerah Buton Selatan La Ode Harwanto dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Plt. Kepala Disdukcapil Buton Selatan Nuhurul Mufida mengatakan capaian IKD meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang baru sekitar 3 persen. Meski demikian, pertumbuhan tersebut belum cukup untuk mengejar kebutuhan digitalisasi dokumen

kependudukan di seluruh wilayah kabupaten. “Informasi mengenai IKD memang belum tersebar luas. Padahal IKD memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan mulai dari KTP, Kartu Keluarga hingga akta kelahiran secara digital,” ujar Nuhurul saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2026).

Upaya digitalisasi tersebut berlangsung bersamaan dengan persoalan klasik administrasi kependudukan, yakni pemerataan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Kecamatan Batuatas masih mencatat capaian terendah dengan 82,58 persen. Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan yang berada paling jauh dari daratan utama Buton Selatan menjadi salah satu kendala dalam menjangkau masyarakat.

Disdukcapil kemudian menyiapkan strategi jemput bola dengan mengirim tim pelayanan langsung ke wilayah yang membutuhkan perekaman. Anggaran untuk kegiatan tersebut telah diusulkan melalui Perubahan Anggaran. Pelaksanaan layanan lapangan akan dilakukan setelah usulan memperoleh persetujuan.

“Kami sudah masukkan usulan dalam Perubahan Anggaran. Begitu disetujui, kami langsung berangkat ke lapangan,” kata Nuhurul.

Secara nasional, digitalisasi identitas kependudukan merupakan bagian dari perkembangan administrasi kependudukan setelah Indonesia menerapkan KTP elektronik secara bertahap sejak 2011. Perkembangan tersebut kemudi-

an bergerak ke IKD yang dirancang untuk menempatkan identitas kependudukan dalam perangkat digital. Secara global, digital identity juga berkembang dalam berbagai bentuk; Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memasukkan isu identitas hukum bagi semua orang sebagai bagian dari target 16.9 pada 2030.

Dengan kondisi tersebut, Disdukcapil Buton Selatan berupaya memperluas aktivasi IKD sekaligus mengejar keteringgalan perekaman e-KTP. Perluasan layanan diarahkan agar masyarakat di wilayah perkotaan maupun kepulauan memperoleh akses dokumen kependudukan secara lebih mudah, cepat, dan tepat waktu.(*)

Hari Jadi ke-485 Baubau Akan Diwarnai Ritual Adat, Expo UMKM, dan Karnaval



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menyiapkan rangkaian peringatan Hari Jadi Baubau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom yang akan berlangsung sepanjang Oktober 2026. Puncak perayaan dijadwalkan pada 17 Oktober dengan upacara, tradisi Pekande Kande, dan malam ramah tamah, sementara sejumlah ritual adat, karnaval budaya, serta pameran UMKM mengisi agenda sebelumnya.

Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., mengatakan rangkaian kegiatan tersebut dirancang tidak hanya sebagai perayaan administratif, tetapi juga sebagai ruang untuk memperkuat kebersamaan masyarakat dan mempertahankan warisan budaya Buton. Pemkot mematangkan agenda itu dalam rapat pada Kamis (24/9/2026) bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra La Ode Aswad, S.Sos., M.Si., serta Kabag Pemerintahan Rickman Ekaputra.

"Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antarwarga sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya luhur Buton," kata La Ode Darus Salam.

Agenda perayaan dimulai 1 Oktober

hingga 31 Oktober 2026. Pada awal bulan, pemerintah mengagendakan pembersihan lingkungan kantor serta pemasangan umbul-umbul dan spanduk di instansi pemerintah, BUMN, perguruan tinggi, dan sekolah se-Kota Baubau. Masyarakat dan aparaturnya juga diimbau menggunakan atribut khas daerah, antara lain Kampuri, syal, dan sarung Buton.

Nuansa budaya semakin kuat memasuki 12 Oktober. Tradisi Santiago atau ziarah kubur dan ritual Haroana Andala akan dilaksanakan di Rumah Singgah Neyalan Pantai Morikana, Bone-Bone. Pada hari yang sama, Baubau Expo atau Pameran UMKM dibuka di Kotamara dan berlangsung hingga 17 Oktober.

Ritual adat kemudian berlanjut dengan Tutturangiana Ouwen Kanakea di Jalan Syekh Abdul Wahid, Kanakea, pada 13 Oktober. Sehari berikutnya, Tutturangiana Batuwampone dijadwalkan berlangsung di samping Rusun Kotamara, disusul Karnaval Budaya dengan rute Kotamara menuju Pantai Kamali.

Waktu pelaksanaan karnaval masih dimatangkan. Pemerintah akan melaporkan kema-

li kepada pimpinan apakah kegiatan dilaksanakan sore atau malam hari, terutama karena terdapat partisipasi dari wilayah eks Kesultanan Buton.

Pada 15 Oktober, masyarakat akan kembali disuguhkan ritual Tutturangiana Batupoaro di Masjid Islamic Center Baubau. Pelaksanaannya menyesuaikan kondisi pasang surut air laut. DPRD Kota Baubau pada hari yang sama mengadakan Rapat Paripurna Istimewa. Rangkaian lainnya mencakup perlombaan domino dan bola voli.

Puncak peringatan berlangsung Sabtu, 17 Oktober 2026, melalui Upacara Bendera Hari Jadi Baubau ke-485 dan HUT Otonom Kota Baubau ke-25 di Lapangan Kantor Wali Kota Baubau. Setelah upacara, tradisi Pekande Kande digelar di Aula Palagimata dengan melibatkan anak yatim piatu, kaum dhuafa, dan keluarga tidak mampu.

Malam harinya, seluruh rangkaian perayaan ditutup dengan Malam Ramah Tamah di Pelataran Kotamara Kota Baubau. Pemerintah menempatkan kegiatan tersebut sebagai momentum pertemuan unsur pemerintah, masyarakat, dan berb-

agai kelompok yang ikut ambil bagian dalam perayaan.

Secara historis, perayaan Hari Jadi Baubau berkaitan dengan perjalanan panjang kawasan Buton yang memiliki tradisi kesultanan dan warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad. Baubau juga memiliki posisi penting dalam sejarah kawasan karena pernah menjadi pusat Kesultanan Buton dan menjadi bagian dari jalur perdagangan antarpulau di kawasan timur Nusantara. Dalam konteks Indonesia modern, penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian berkembang melalui kebijakan otonomi daerah setelah reformasi, termasuk pembentukan Kota Baubau sebagai daerah otonom.

"Melalui partisipasi masyarakat dan UMKM lokal, kami berharap rangkaian peringatan ini juga dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah," ujar La Ode Darus Salam. Dengan demikian, perayaan Oktober 2026 tidak hanya diarahkan sebagai seremoni hari jadi, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertemukan sejarah, tradisi, kegiatan ekonomi, dan kebersamaan masyarakat Baubau. (*)

BPS Baubau Perkuat Satu Data, Diskominfo Siapkan Bukti Dukung untuk EPSS



Laporan: Andina

BAUBAU, BP-Penguatan kualitas dan tata kelola data pemerintah daerah menjadi fokus Pembinaan Statistik Sektoral yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau, Selasa (29/9/2026). Diskominfo, Bapperida, Dinas Pariwisata, dan Kesbangpol Kota Baubau mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan data sektoral dapat digunakan secara akurat dalam perencanaan pembangunan.

Kepala Diskominfo Kota Baubau H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menunggu pelaksanaan evaluasi untuk membenahi administrasi dan pengelolaan data. Setiap OPD sebagai produsen data perlu menyiapkan bukti dukung sejak awal agar proses evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan dengan lebih terukur.

"Kolaborasi seluruh OPD penting untuk mengevaluasi pengelolaan data dan menyiapkan bukti dukung sejak dini," kata Andi Hamzah dalam kegiatan tersebut.

Menurut dia, penguatan statistik sektoral tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan angka, tetapi juga menyangkut proses bagaimana data dikumpulkan, dikelola, diperbarui, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang tertata dibutuhkan pemerintah untuk menyusun kebijakan berdasarkan kondisi faktual di daerah.

Pembinaan yang dibuka Kepala BPS Kota Baubau Musdin, SST, itu dilaksanakan dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan nasional dalam mendorong data pemerintah yang terintegrasi dan memiliki standar yang jelas.

Musdin mengatakan kualitas merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Data pemerintah harus memenuhi prinsip akurat, konsisten, relevan, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

"Fokus pembinaan adalah memastikan data yang dihasilkan akurat, konsisten, relevan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Musdin.

Selain kualitas, pembinaan mencakup aspek kelembagaan. Koordinasi antarperangkat daerah, pembagian kewenangan, dan peningkatan kapasitas aparaturnya menjadi bagian yang perlu diperkuat agar penyelenggaraan statistik sektoral tidak berjalan secara parsial.

Dalam struktur Satu Data Indonesia di Kota Baubau, BPS memiliki posisi sebagai pembina data. Bapperida berperan sebagai koordinator, Diskominfo menjadi walidata, sedangkan OPD bertindak sebagai produsen data.

Pembagian peran tersebut menempatkan setiap lembaga pada fungsi yang saling berkaitan dalam menghasilkan data pemerintah daerah.

Secara nasional, gagasan Satu Data Indonesia memperoleh landasan formal melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 17 Juni 2019. Kebijakan tersebut muncul di tengah kebutuhan pemerintah untuk mengurangi persoalan perbedaan definisi, standar, dan sumber data antarinstansi yang dapat memengaruhi perencanaan pembangunan.

Secara historis, pengembangan statistik resmi juga menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Fundamental Principles of Official Statistics menempatkan statistik resmi sebagai informasi penting bagi pemerintah, perekonomian, dan masyarakat. Prinsip tersebut kemudian menjadi rujukan dalam penguatan kualitas, independensi, dan integritas statistik di berbagai negara.

Pemahaman terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN) juga menjadi bagian dari pembinaan di Baubau. Melalui keterhubungan antara statistik daerah dan statistik nasional, data sektoral diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan internal pemerintah daerah, tetapi juga dapat mendukung penyusunan statistik nasional secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. (*)